

**DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN DANA DESA  
TERHADAP KEMAJUAN PEMBANGUNAN DESA  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
(IMPACT OF IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUNDING BUDGET  
ON THE PROGRESS VILLAGE DEVELOPMENT IN INDRAGIRI HILIR  
DISTRICT)**

Gevisoner<sup>1</sup>, Moris Adidi Yogia<sup>2</sup>, Zulkifli<sup>2</sup>, Hendry Andry<sup>2</sup>,  
Sadriah Lahamid<sup>2</sup>, Syaprianto<sup>2</sup>, Karyanti<sup>1</sup>, Ibrahim Suriawan<sup>1</sup>, Arbaini<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

<sup>2</sup>Universitas Islam Riau

Email : irgevisioner@gmail.com

***Abstract***

*The Village Fund Budget has the aim to improve the welfare of the village community and the quality of human life, in implementation there are many obstacles. This study aims to formulate a strategic alternative that is suitable for the implementation of rural development programs in Indragiri Hilir Regency in accordance with the characteristics of the village so that the implementation of development runs effectively and efficiently. This type of research is a qualitative descriptive study, conducted in Indragiri Hilir Regency. The results of the study illustrate that the Village Fund Budget has had quite an impact on the construction of road and bridge infrastructure, while for community empowerment it is still very low. The program to increase the capacity of village apparatus resources, especially for financial management in accordance with the rules and understanding of the authority of the village head, is needed to optimize the management of the village fund budget.*

**Keywords:** *Village Fund Budget, Policy, Village Development, Village Apparatus*

**Abstrak**

Anggaran Dana Desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, dalam pelaksanaannya menemui banyak kendala. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan alternatif strategi yang cocok untuk pelaksanaan program pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan karakteristik desa sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan efisien. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis data yang dikumpulkan data primer dan sekunder terkait pengelolaan anggaran dana desa dan permasalahannya. Analisa data yang digunakan adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan Hasil penelitian menggambarkan bahwa Anggaran Dana Desa telah cukup memberikan dampak pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat masih sangat rendah. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa khususnya untuk pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan dan pemahaman tentang kewenangan kepala desa sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dana desa.

**Kata kunci :** Anggaran Dana Desa, Aparatur Desa, Kebijakan, Pembangunan Desa

## **PENDAHULUAN**

Sejalan dengan dinamika perkembangan dan kemajuan otonomi daerah, Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan pembangunan desa. Pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimaknai dengan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Winarno, 2016)

Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah memberikan Dana Desa (DD). Dalam upaya pelaksanaan kebijakan tersebut Pemerintah telah menerbitkan berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi Kelurahan yang merasa diperlakukan tidak adil, di mana Desa mendapat Dana Desa, Anggaran Dana Desa dari APBN.

Namun dalam perjalanannya program prioritas pembangunan desa yang tidak sedikit permasalahan yang dihadapi pemerintahan desa. Anggaran Dana Desa belum mencapai target yang diharapkan yakni tidak terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Beberapa hal ini disebabkan karena ketidakmampuan sumber daya aparat desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak tergalinya potensi desa yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa, sehingga sikap ketergantungan desa kepada pemerintah disetiap tingkatan masih sangat tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana hasil capaian pelaksanaan program pembangunan Desa di kabupaten Indragiri Hilir, 2) Apa strategi dan kebijakan yang cocok untuk pelaksanaan program pembangunan Desa setelah mendapat Anggaran Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir ?. Dengan tujuan penelitian

adalah : 1) Mengetahui hasil capaian pelaksanaan program pembangunan Desa di kabupaten Indragiri Hilir setelah mendapat Dana Desa (DD), 2) Merumuskan alternatif strategi yang cocok untuk pelaksanaan program pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan karakteristik desa sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan efisien.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni jenis penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau kejadian secara apa adanya (Harun , 1994) Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Juni hingga November 2018. Penentuan lokasi penelitian secara purposive, yakni 1) Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang memiliki desa terbanyak di Provinsi Riau, 2) Di Kabupaten Indragiri Hilir sudah memiliki model program pembangunan desanya, dengan nama Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

Jenis data penelitian adalah primer dan sekunder, dengan sumber data Pemerintah kabupaten (Bappeda, Dinas PMD dan Tata Pemerintahan Kantor Bupati), perangkat desa/kelurahan Kepala Desa, Lurah dan Masyarakat, dengan total responden dan key informan sebanyak 21 orang. Sumber data didapat secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Teknik pengambilan data yang digunakan dengan teknik triangulasi, yakni kombinasi observasi, wawancara, literatur, dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD) (Faried, 1997).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)**

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) adalah salah satu program prioritas pembangunan kabupaten indragiri hilir sebagaimana telah ditetapkan dalam perda nomor 5 tahun 2014 tentang RPJMD kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013-2018; program DMIJ bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengalokasikan sejumlah dana kepada pemerintah desa melalui mekanisme tertentu.

Dana program DMIJ bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa dan bantuan keuangan. Sasaran program DMIJ adalah masyarakat desa, kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan desa dalam melaksanakan pembangunan desa yang meliputi kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 1 . Rekapitulasi Penyaluran Dana DMIJ Tahun Anggaran 2014 - 2016 Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Kecamatan	Tahun (x 000)		
		2014	2015	2016
1.	Reteh	6.450.000,-	7.675.344,-	6.574.948,-
2.	Enok	5.350.000,-	6.872.989,-	6.118.133,-
3.	Kuala Indragiri	3.200.000,-	4.273.584,-	4.285.065,-
4.	Tempuling	3.450.000,-	3.834.874,-	3.118.284,-
5.	Gaung Anak Serka	2.450.000,-	6.071.980,-	5.271.503,-
6.	Mandah	7.600.000,-	11.183.381,-	10.193.436,-
7.	Kateman	4.050.000,-	5.904.203,-	4.839.538,-
8.	Keritang	9.800.000,-	11.943.676,-	10.088.631,-
9.	Tanah Merah	4.750.000,-	6.481.849,-	5.571.224,-
10.	Batang Tuaka	5.250.000,-	7.850.240,-	7.046.997
11.	Gaung	8.300.000,-	10.908.300,-	9.289.903,-
12.	Tembilahan Hulu	1.700.000,-	3.146.788,-	2.538.510,-
13.	Kemuning	5.700.000,-	6.932.388,-	6.297.550,-
14.	Pelangiran	8.100.000,-	10.526.190,-	9.165.890,-
15.	Teluk Belengkong	7.850.000,-	8.594.681,-	7.233.162,-
16.	Pulau Burung	8.650.000,-	8.865.667,-	7.568.517,-
17.	Concong	2.200.000,-	3.182.039,-	2.911.889,-
18.	Kempas	5.500.000,-	7.057.306,-	5.870.710,-
19.	Sungai Batang	2.900.000,-	4.242.827,-	3.855.992,-
	T o t a l	105.250.000,-	135.548.306,-	117.839.882,-

Program ini tidak akan berhasil dengan maksimal, tanpa ada program pendamping, yaitu Program Pendampingan yang dimulai tahun 2014 hingga saat ini. Pendampingan dari tahun 2014 – 2016: a) Fasilitator kabupaten/team leader terdiri dari 8 orang, b) Fasilitator masyarakat kecamatan 38 orang (pemberdayaan dan teknik), c) Pendamping desa di tiap desa (197 orang). Pendampingan tahun 2017 terjadi perubahan pendampingan di desa tahun 2017 yaitu setiap Pendamping Desa(PD) mendampingi 1-2 desa, sehingga total pada tahun 2017 berjumlah 104 orang.

## **Implementasi Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan dana desa (DD) sangat tergantung pada komitmen pemerintah desa terhadap prinsip-prinsip dan regulasi DD, serta komitmen memprioritaskan tujuan penggunaan DD, dan hal ini perlu dipahami terutama mengenai regulasi mekanisme penyaluran DD oleh Pemerintah Desa, karena penggunaan DD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir sejak awalnya pengalokasian DD yang dimulai pada tahun 2015 hingga ke tahun anggaran 2018 belum optimal dilakukan.

Penggunaan DD masih berorientasi pada pembangunan fisik sarana desa dan belum mampu mengarah kepada peningkatan kapasitas pemerintahan desa, dan peningkatan sumberdaya manusia masyarakat desa. Hal ini tidak terlepas dari konsep pembangunan dalam penggunaan DD masih bersifat *top down* yakni konsep usulan pembangunan desa dalam penggunaan DD umumnya masih muncul dari kehendak pemerintah desa yang walalupun dilakukan secara musyawarah dengan masyarakat desa setempat dan aparat desa yang dirasa masih kurang optimal.

Dari analisis permasalahan yang telah dilakukan ternyata faktor-faktor yang menghambat penggunaan DD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir sangat dominan dipengaruhi oleh tingkat sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa, faktor sarana dan prasarana desa yang cukup memprihatinkan serta jarak tempuh atau letak geografis yang jauh antara desa dari pusat ibukota Kabupaten.

## **Dampak Penggunaan Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa (DD) efektif dalam meningkatkan pembangunan desa, terutama infrastruktur desa, karena selama ini DD yang ada sebagian besar dialokasikan untuk bidang infrastruktur. Sedangkan untuk pengalokasian di bidang pemberdayaan dan bidang pendidikan masih sangat minim oleh karena itu perlu upaya agar kegiatan bidang yang lain dalam pengalokasian DD juga perlu dilaksanakan pada tiap desa yang ada di kabupaten Indragiri Hilir.

Keberadaan pendamping desa saat ini masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah Desa, sehingga keberadaan pendamping desa perlu dipertahankan, meskipun ada wacana pengurangan tenaga pendamping, perlu dilakukan secara selektif, sesuai permasalahan yang ada di setiap desa. Hal ini terkait pengalokasian DD ditemukan bahwa ada tiga desa di Kabupaten Indragiri Hilir yang sedang bermasalah yakni DD nya dibelikan alat berat oleh kepala desa, sehingga yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan pengalokasian tersebut ke ranah hukum, satu orang dari tiga kepala desa yang bermasalah tersebut sudah ditahan oleh pihak kepolisian dan dua orang lagi sedang menjadi buronan Polres Indragiri Hilir.

Pada saat pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes di tingkat desa sudah mewakili keterwakilan tokoh masyarakat dari setiap unsur lembaga pemerintahan desa yang ada, akan tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes tersebut masih ditemukan program-program yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat akan tetapi tidak diakomodir oleh kepala desa serta masih kurangnya partisipasi dari masyarakat yang ada di desa Kabupaten Indragiri Hilir.

Partisipasi masyarakat desa terutama dalam kegiatan gotong royong yang merupakan *brand culture* masyarakat desa perlahan sudah mulai terkikis dan hilang di tengah-tengah masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Karena persepsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat menganggap bahwa apapun program pembangunan yang dilakukan di tingkat desa sudah ada anggarannya jadi masyarakat beranggapan tidak perlu lagi ada kegiatan gotong royong yang melibatkan peran serta masyarakat desa.

Faktor personal, penilaian-penilaian yang diberikan oleh individu-individu masyarakat dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman individu tersebut dan partisipasinya dalam kegiatan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Semakin individu masyarakat berpartisipasi, maka persepsi atas kegiatan tersebut semakin positif. Sebaliknya, jawaban tidak tahu dipengaruhi oleh bagaimana dorongan individu tersebut mau berpartisipasi dalam kegiatan.

Faktor situasional, faktor ini terkait dengan kondisi eksternal yang mempengaruhi bagaimana individu-individu menilai kegiatan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Semakin kepala desa sering berinteraksi dengan individu

masyarakat maka persepsi atas kinerjanya semakin baik, demikian juga sebaliknya. Apabila informasi pembangunan semakin disebarluaskan dan masyarakat semakin tahu, persepsi mereka terhadap kegiatan juga semakin positif. (Winarno, 2004).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa persepsi pemerintahan desa terhadap pemanfaatan dana desa dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan individu masing-masing. Davidoff (1981) dalam (Rahardjo, 2004), menjelaskan bahwa persepsi itu bersifat personal dimana persepsi dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang tidak sama sehingga dalam mempersepsikan suatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain.

Berdasarkan hasil temuan empiris partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa lebih besar pada pelaksanaan. Pada pelaksanaan, hampir seluruh responden ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan tenaga, fasilitas, sosial, peralatan. Ada lima bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan kemahiran, serta sosial. Partisipasi juga terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Rahardjo, 2004)

Masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan musyawarah desa/dusun terkait pemanfaatan dana desa terbilang kadang-kadang mengikuti, dan dalam mengikuti kegiatan tersebut masyarakat hanya sebagian yang berpartisipasi menyumbangkan ide, gagasan dan tanggapan namun ketika mensosialisasikan perencanaan pembangunan mereka aktif memberitahu warga lain, pada pelaksanaannya partisipasi masyarakat terbilang “tinggi” pada partisipasi tenaga dan sosial daripada partisipasi harta benda karena seseorang dengan penghasilan rendah cenderung bisa berpartisipasi memberikan tenaganya daripada materi.

Berbeda dengan seseorang yang berpenghasilan tinggi, keterlibatan dalam memberikan tenaga kurang dan lebih cenderung memberikan sumbangan materi. Namun secara keseluruhan masyarakat telah mampu berkomunikasi baik dengan pemerintah, keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka melihat hasil yang mengemukakan bahwa adanya hubungan dari persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan dana

desa dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat, emosional dan tindakan mengenai konsep dana desa itu sendiri menjadikan pemanfaatan secara fisik dan nonfisik dirasakan langsung oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga menjadi penentu keberhasilan dari pemanfaatan dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan dalam beraktifitas sehari-hari, karena jika bukan masyarakat yang terlibat langsung dalam pemberdayaan maka tidak akan terjadi pembangunan di daerah tersebut.

Kemudian tambahan berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pemerintahan desa dan kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat dua bulan terakhir menjadi semakin sulit dan terpuruk karena masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar berpenghasilan dari buah kelapa dan kelapa sawit, hal ini dipengaruhi karena harga CPO dunia semakin turun, sehingga mengakibatkan ekonomi masyarakat desa menjadi semakin menjerit.

Lambatnya peningkatan ekonomi masyarakat desa saat ini juga disebabkan oleh penyelenggaraan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum berjalan dengan maksimal, karena kepala desa masih penuh keraguan untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena mereka takut salah dalam mengambil kebijakan terkait pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan Program Badan Usaha Milik Desa tersebut. Pembentukan BUMDes harus mempertimbangkan aspek pembangunan daerah yang terangkum dalam RPJMD dan sinergitas tiap kecamatan, sehingga tiap kecamatan bisa saling mendukung. Pembangunan BUMDes yang tidak memperhatikan aspek kualitas, berpotensi menyebabkan kerugian dalam pengelolaan keuangan desa, dan tentu saja pendirian BUMDes tidak memiliki implikasi apapun dalam pembangunan Desa (Winarno, 2016).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bahwa beberapa harapan masyarakat terhadap optimalisasi pemanfaatan anggaran dana desa di kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa perlu dilakukan terutama dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban DD yang baik agar semakin mengurangi ketergantungan pemerintah desa terhadap pendamping desa; hal tersebut disampaikan oleh informan bahwasanya ketergantungan pemerintah



desa terhadap pendamping sangat tinggi dan beberapa kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir mengurangi jumlah pendamping desa, yang didampingi hanya desa yang betul-betul membutuhkan pendamping sementara yang sudah bagus tata kelolanya dilepaskan dengan sendirinya tanpa pendampingan dari pihak kabupaten.

2. Pelatihan UKM bagi masyarakat desa, kegagalan UKM yang ada di desa pada dasarnya terjadi karena belum adanya inovasi yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk peningkatan mutu hasil usaha kecil menengah tersebut, terutama dalam hal menciptakan varian rasa yang berbeda, sistem pengemasan sesuai dengan standart perusahaan dan pangsa pasar yang belum jelas, sehingga jarang sekali ditemukan di Indonesia UKM yang mampu memberikan profit yang benefit dan mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan yang ada di desa. Padahal kalau UKM tersebut dikelola dengan baik dan penuh dengan inovasi maka tidak tertutup kemungkinan UKM desa akan menjadi potensi yang baik dan merupakan hasil produk desa apalagi jika pemerintah mampu memberikan akses pangsa pasar yang sampai ke mancanegara.
3. Potensi pariwisata yang ada di desa perlu digali dan ditingkatkan dengan keterlibatan peranan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, jika kita melihat desa-desa di sekitaran Lembang Jawa Barat dan Bali sudah mampu pemerintahan desa disana bersama masyarakat desa mengelola potensi pariwisata yang ada di desa mereka dengan baik sehingga potensi tersebut mampu memberikan sumbangsih bagi peningkatan pendapatan bagi desa mereka. Khusus di Indragiri Hilir ada beberapa tempat pariwisata yang bagus yang apabila Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi mau berperan aktif di dalam peningkatan potensi yang ada maka akan mampu memberikan PAD bagi pemerintah desa yang ada di sana, terkait potensi pariwisata ini pemerintah tidak bisa hanya melimpahkan itu semua kepada pemerintah desa.
4. Perlunya tekanan pemerintah kepada swasta agar berperan untuk berkontribusi membangun desa, pengalokasian dana *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan harus semakin jelas agar kewajiban perusahaan terhadap masyarakat terpenuhi dan berwirasauasanya

perusahaan disekitar perusahaan mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi kehidupan masyarakat desa. Karena payung hukum terkait CSR perusahaan ini sudah ada Peraturan Daerahnya pada tingkat Provinsi, hanya saja pengimplementasian Perda itu yang mesti harus dijalankan oleh Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah kabupaten/kota.

5. Penambahan honor dan intensif perangkat desa, honor perangkat desa yang ada sekarang dirasa masih sangat minim apabila dikaitkan dengan UMR baik yang ada di tingkat kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Karena bekerja di desa saat ini masih ada informan yang beranggapan lebih banyak kerja sosialnya ketimbang pekerjaan pembangunan desa, belum lagi ditambah bahwa bekerja di tingkat desa harus mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang negara yang masuk ke kas desa. Selain honor aparatur pemerintah desa itu kecil akan tetapi terkadang yang seharusnya sudah cair akan tetapi belum cair oleh karena rasionalisasi kebijakan nasional maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Terkadang membuat kepala desa harus berani berhutang dulu di tokoh bangunan agar proyek yang sedang dikerjakan berjalan dan bisa selesai tepat pada waktu yang sudah ditentukan oleh *stakeholders* yang ada di desa.
6. Perlunya pemerintah pusat mempertahankan kebijakan dana desa (DD) ini kalau perlu ditingkatkan, masyarakat yang ada di tingkat pemerintah desa dan pemerintah desa sangat berharap agar dana desa yang ada tetap dipertahankan dan tingkatkan agar pemerintah desa bisa lebih banyak melakukan pembangunan di desa. Karena dengan telah bergulirnya dana desa tersebut mengakibatkan banyak perubahan infrastruktur yang ada di desa.
7. Regulasi kebijakan dari pemerintah provinsi yang langsung membantu pemerintah desa dan agar dana desa tersebut bisa dibeli berupa asset desa, karena masih ada ditemukan di Kabupaten Indragiri Hilir , kantor desa yang ada berada di tanah hibah akan tetapi ketika anak si pemilik tanah dan sudah besar mereka menuntut tanah mereka kembali di tangan mereka, karena kesalahan masa lampau segala hibah dari masyarakat yang diucapkan secara lisan dan tidak ada hitam di atas putihnya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan masih ditemukan beberapa faktor penghambat mengenai program prioritas pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hilir dan di Kabupaten Indragiri Hulu antara lain bahwa rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SMP dan SMA sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMA. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan DD pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan DD yang menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masih kurang, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembanunan fisik seperti perbaikan jalan dan lain-lain. Sangat penting sebenarnya adanya kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Monotonnya pola pikir masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga masih kurang bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan DD untuk pemberdayaan masyarakat desa.

### **Strategi Pembangunan Desa Dan Kelurahan Pada Masa Mendatang**

Faktor penghambat dalam pengelolaan DD dalam pemberdayaan selanjutnya yaitu rendahnya swadaya masyarakat desa. Hal itu terlihat kurangnya partisipasi masyarakat ketika ada kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh pemerintah desa. Padahal swadaya masyarakat tersebut merupakan bagian dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah. Kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera. Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat desa pada bidang perkebunan kepala sawit dan kelapa yang saat ini harganya mengalami penurunan, maka berdampak pada tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desanya. Di dalam regulasi yang ada tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa salah satu tujuan DD adalah mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang berhasilnya pengelolaan DD yang berdampak pada rendahnya Swadaya masyarakat.

Akses jalan dari sepanjang jalan yang ada di desa-desa di kabupaten Indragiri Hilir masih banyak ditemukan jalan yang berlubang hingga retak-retak dan bahkan sangat sulit dilalui oleh kendaraan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi Pihak Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sejumlah titik yang menjadi masalah.

Pembangunan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat di desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat keseluruhan agar menjadi lebih baik dan menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Persepsi sebagian besar masyarakat merasakan bahwa mereka hanya kadang-kadang saja dilibatkan didalam menyusun rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar yang ada di lingkungannya dan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menyatakan bahwa mereka selalu dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana di lingkungannya. Masyarakat yang selalu terlibat dalam menyusun rencana kegiatan pembangunan sebagian besar adalah mereka yang menduduki kepengurusan dalam organisasi kemasyarakatan di lingkungannya baik di tingkat RT, RW maupun organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan desa memperlihatkan bahwa kurangnya partisipasi dari masyarakat, alasannya beragam-ragam dari pekerjaan yang hanya ingin berkebun saja, mencari ikan, alasan kesehatan ataupun karena memang malas. Misalnya untuk proyek pembangunan drainase, masyarakat turut terlibat dalam pengerjaannya karena mereka dibayar dalam proyek tersebut. Manfaat yang dirasakan warga atas adanya program pemerintahan ini yaitu terbukanya peluang bagi warga untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan penghasilan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Secara keseluruhan persepsi pemerintah desa dalam hasil capaian pelaksanaan program pembangunan desa di kabupaten Indragiri Hilir setelah mendapat dana desa, cukup berarti khususnya infrastruktur jalan dan jembatan, apabila dibanding sebelum mendapat dana desa dari pusat, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat masih sangat rendah.

2. Strategi dan kebijakan pemerintah desa setelah mendapat anggaran dana desa di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :
  - a. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa khususnya untuk pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan dan pemahaman tentang kewenangan kepala desa
  - b. Program-program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat
  - c. Membentuk komunikasi yang efektif dan baik dari kepala desa dan perangkat desa kepada masyarakat tentang prioritas pembangunan desa.

### **Saran**

1. Pemerintah Provinsi Riau perlu membuat program yang ikut andil membangun desa seperti bantuan keuangan dari provinsi dapat dialokasikan untuk membeli asset desa.
2. Peranan pendamping masih sangat menjadi kebutuhan desa dan kelurahan
3. Peningkatan *capacity building* perangkat desa dan kelurahan perlu dilakukan
4. Padat karya pola dana desa perlu ditinjau ulang (hasil dan kerja tidak seimbang).

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau yang telah berkenan membiayai kegiatan ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, DPRD Riau, Kepala dan Jajaran Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir atas segala kerjasamanya dalam penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Faried, 1997, *metodologi penelitian Sosial dalam Bidang Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Al Rasyid, Harun, 1994, *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Kartasasmita, 2001, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta

Rahardjo, 2004, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta

Siagian 2007. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta

Winarno,Budi 2016, Kebijakan Publik Era Globaisasi, Teori, Proses dan Studi Kasus Komperatif,CAPS (Centre Of Academic Publishing Service), Yogyakarta

Perbub Inhil antara lain Perbub Inhil nomor 26 tahun 2015 tentang Tatacara Pembagian Alokasi Dana, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, Serta Bantuan Keuangan Desa Melalui Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tahun anggaran 2015